

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BULANGKULON KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

ALETHA BAINEO

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra

rethabaineojelitha86049@gmail.com

Abstrak

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cerminan dari asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance* (pemerintahan baik). Pentingnya keikutsertaan dan bentuk partisipasi dari masyarakat yang diberikan merupakan penunjang keberhasilan dari sebuah program yang diberikan oleh pemerintah. Pembangunan tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Partisipasi meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi. Pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Desa, yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan di pedesaan. Pembangunan infrastruktur di desa itu meliputi perbaikan jalan, pembuatan sanitasi, pembangunan gedung sekolah dan sebagainya, semua itu membutuhkan partisipasi langsung dari masyarakat mulai dari tahap perencanaan (pengajuan proyek pembangunan), pelaksanaan (proses pembangunan suatu infrastruktur desa) di monitoring proses pembangunannya, pemanfaatan dan evaluasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dengan melihat faktor pendukung partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Bulangkulon. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Bulangkulon dalam pembangunan infrastruktur cukup baik, karena masyarakat memberikan bantuan berupa tenaga, dan pemikiran. Hal ini menunjukkan bahwa hampir keseluruhan anggota masyarakat mengetahui dan aktif dalam rangkaian kegiatan pada pembangunan infrastruktur. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi, diantaranya adanya sosialisasi, kesempatan, dan faktor pemimpin.

Kata Kunci: Partisipasi, pembangunan infrastruktur, desa.

Abstract

Community participation in every process of making public policy is important as a reflection of the principle of democracy in a country. This becomes very appropriate when community participation then becomes one of the principles that must be carried out by the government in an effort to realize good governance. The importance of participation and the form of community participation that is given is supporting the success of a program provided by the government. Participation consists of planning, implementing, pleasuring the

result, and evaluating. Central government given assistance rural fund, it aims to encourage the acceleration of development in rural areas. Infrastructure development in the village includes road improvement, sanitation construction, construction of school buildings and so on, all that requires direct participation from the community starting from the planning stage (project development), implementation (the process of building a village infrastructure) in monitoring the development process, utilization and evaluation.

The purpose of this research is to understand and analyze public participation, by looking at the supporting factors the participation of community to the implementation of development in Sinarsari village. The qualitative descriptive method is used explain this research. The collecting data's technique used in this research are interview, and documentation. The result of this research indicates that participation of road infrastructure is quite good. That situation indicates that almost all the community know and actively participated in road infrastructure. There are some things that affect people in participating, like a socialization, chance, and the leader.

Keywords: Participation, infrastructure development, village

Pendahuluan

Pembangunan suatu negara pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, begitu juga dengan negara Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, yakni tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Maka dari itu, pembangunan nasional perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Beberapa tahun terakhir, perkembangan penduduk di Indonesia terjadi demikian pesat. Hasil proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa. Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) 2019 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yakni lebih dari 68% dari total populasi. Adapun penduduk dengan kelompok umur 0-14 tahun (usia anak-anak) mencapai 66,17 juta jiwa atau sekitar 24,8% dari total populasi. Kemudian penduduk kelompok umur 15- 64 tahun (usia produktif) sebanyak 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dan kelompok umur lebih dari 65 tahun (usia sudah

tidak produktif) berjumlah 17,37 juta jiwa atau sebesar 6,51% dari total populasi. Jumlah Penduduk Indonesia akan Mencapai Puncaknya pada 2062) Rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk Indonesia pada tahun ini mencapai 45,56%. Artinya setiap 100 orang yang berusia produktif (angkatan kerja) mempunyai tanggungan 46 penduduk tidak produktif (usia 0-14 tahun ditambah usia 65 tahun ke atas). Semakin tinggi rasio ketergantungan mengindikasikan semakin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif.

Jumlah penduduk Indonesia yang lebih banyak tinggal di pedesaan harus diimbangi dengan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terfokus di daerah pusat saja. Pembangunan infrastruktur termasuk dalam pembangunan fisik yang keberadaannya memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang. Selain itu, wilayah yang memiliki kelengkapan infrastruktur yang berfungsi dengan baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam mewujudkan pembangunan desa seperti yang dikehendaki oleh masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari setiap kalangan, mulai dari rakyat biasa hingga segenap aparat di semua lini birokrasi. Selain itu, potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal. Sebagai negara yang menganut asas desentralisasi, pemerintah negara Republik Indonesia memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desa mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembangunan perdesaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan daerah, di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermukim di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Upaya mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan dalam pembangunan yang berbasis langsung dari inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun infrastruktur dasar perdesaan. Dua faktor ketertinggalan perekonomian pedesaan dibandingkan dengan kota yaitu : (1) Konteks struktural dan (2) konteks kultural. Konteks struktural menunjukkan pada kebijakan pembangunan (ekonomi & politik) yang lebih mengutamakan pembangunan perkotaan ketimbang perdesaan. Ketimpangan pembangunan khususnya di perdesaan, termasuk di dalamnya pembangunan prasarana dan sarana transportasi di perdesaan, tidak terlepas dari implementasi kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dengan negara sebagai aktor utama. Kebijakan pembangunan yang bersifat *betting strong policy* dengan *strategi state cetered development*. Dalam konteks ini negara menjadi inisiator, pelaksana, sekaligus pengawas dari keseluruhan pembangunan. Melalui aparat birokrasi sebagai kepanjangan tangan pemerintah, hampir semua proses pembangunan baik yang sifatnya fisik maupun non fisik ditentukan, diarahkan dan didorong oleh mereka. Model pembangunan yang *top down* ini tidak saja telah menciptakan ketergantungan masyarakat kepada negara, lebih dari itu telah mematikan inisiatif dan partisipasi masyarakat. Masyarakat menjadi pasif sekaligus obyek pembangunan. Dalam konteks ini pendekatan *development for the people* lebih mengedepan ketimbang *development of the people*.

Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata pada pihak seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi

pembangunan akan meningkat. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tersebut di atas peran serta masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya sudah sangat besar, hal ini ditandai dengan adanya sumbangan berupa tenaga, pendanaan, tanah pekarangan, dan material.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Selain itu, Undang-undang desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukkan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Borni, 2015). Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Bentuk pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

Gresik merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk cukup besar di Provinsi Jawa Timur sehingga dirasa perlu dilakukan pembangunan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil pengamatan, permasalahan yang ditemukan dan sangat urgent di Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ini adalah di infrastruktur Jalan. Akses jalan yang harus dilalui masyarakat sangat sulit padahal akses jalan tersebut merupakan satu-satunya akses jalan yang dilalui masyarakat desa untuk sampai ke kota. Infrastuktur jalan yang harusnya dinikmati oleh masyarakat sekitar desa tersebut malah tidak sesuai harapan. Hal ini menimbulkan rasa keprihatinan karena yang seharusnya dapat mensejahterakan rakyat, namun belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan justru merugikan masyarakat. Sehingga menimbulkan keluhan-keluhan dari masyarakat, dan tampaknya keluhan dari masyarakat desa kurang ditanggapi dengan serius oleh pihak atasan ditunjukkan dengan tidak adanya kemajuan yang dilakukan

oleh pemerintahan. Jalan raya itu ibaratkan seperti aliran darah di dalam tubuh manusia. Jika aliran darahnya tidak lancar atau terhambat, otomatis akan mengganggu sistem organ yang lain dalam tubuh. Demikian pun halnya dengan pembangunan berupa jalan. Jika akses jalan di suatu daerah macet dan tidak layak untuk di lewati, maka dapat dipastikan perkembangan di daerah tersebut akan terhambat. Para investor mengurungkan niatnya untuk berinvestasi karena kurangnya pembangunan akses jalan raya. Perekonomian dan pembangunan pun dapat terhenti.

Tinjauan Tentang Masyarakat

Menurut Soekanto (1993: 104), para antropologi sosial biasanya mengartikan masyarakat sebagai wadah dari orang-orang yang buta huruf, mengadakan reproduksi sendiri, mempunyai adat istiadat, mempertahankan ketertiban dengan menerapkan sanksi-sanksi sebagai sarana pengendalian sosial, dan yang mempunyai wilayah tempat tinggal yang khusus. Istilah masyarakat terkadang dipergunakan dalam artian "*gesellschaft*" atau sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas sifatnya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi-organisasi tertentu, dalam hal ini maka masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu pula.

Tinjauan Tentang Partisipasi dan Konsep Partisipasi

Dalam sebuah pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Pembangunan masyarakat diarahkan pada perbaikan kondisi hidup masyarakat. Pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik. Oleh karena itulah partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu pembangunan tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep-konsep partisipasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Bornby dalam Theresia (2014: 196), mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk "mengambil bagian" yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sementara

itu, Adisasmita (2006: 34) mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Hal senada juga dikemukakan oleh Chandra (2003: 5) yang menjelaskan bahwa partisipasi sebagai pengetahuan dan teknik yang ditujukan sebagai alat penyelesaian masalah-masalah pembangunan, berjalan dan tidaknya, tergantung pada konteks-konteks spesifik yang terkait dengan faktor-faktor struktural, norma-norma yang berlaku, organisasi sosial, pola-pola hubungan kekuatan, pola-pola tindakan bersama, serta institusi-institusi politik yang telah digunakan sebelumnya dalam komunitas.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moeloeng (2011: 4) tipe penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sugiyono (2016: 9) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini berlokasi di Kantor Desa Bulangkulon, kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Waktu Penelitian, dimulai dari tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan 29 Juli 2019. Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian dilakukan pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Menurut Sugiyono (2016: 207), penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang

akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Menurut Spradley dalam Sugiyono (2016: 209), terdapat empat alternatif dalam menetapkan fokus yaitu:

- a. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.
- b. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing dominan.
- c. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.
- d. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teoriteori yangtelah ada.

Partisipasi masyarakat di Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dapat dianalisis menggunakan teori Cohen dan Uphoff dalam Sari (2016: 63) yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
- b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program
- c. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat

Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi.

Serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di suatu desa, yakni seperti adanya faktor kesempatan/waktu, faktor kepuasan masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer . Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data dalam penelitian ini adalah Informan. Adapun data sekunder dalam peneltian ini adalah dokumen kecamatan ,jurnal,buku,peraturan perundang-undangandan penelitian terdahulu, Informan dalam peneltian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari: Mayarakat setempat, tokoh- tokoh Masyrakat Desa Bulangkulon, Kepala Desa Bulangkulon, dengan menggunakan teknik *pourposive sampling* dengan pertimbangan bahwa,kesemua informan tersebut adalah orang- orang yang memahami betul persoalan pembaguanan infrastruktur yang ada di Desa Bulangkulon,Kecamatan.

Benjeng, Kabupaten.Gresik, maka pemilihan informasi akan berkembang sesuai dengan kebutuhan atau relevan data (Sugiono, 1994:61).

Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan informan sesuai panduan wawancara yang hasilnya dicatat dan sebagian direkam. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah *handphone*, yang dilengkapi pula dengan catatan-catatan kecil peneliti. Wawancara dilakukan bersamaan dengan observasi. Menurut Hadi dalam Sugiyono (2016: 138) mengemukakan bahwa angapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuisisioner (angket)

Sugiyono (2016: 244) berpendapat bahwa teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pertama ada reduksi data (*data reduction*), mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Kedua yakni penyajian data (*data display*), dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Serta yang ketiga yakni kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2011: 324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria: Derajat Kepercayaan (*credibility*). Dalam teknik keabsahan data bisa menggunakan tiga tahap yakni triangulasi, kecukupan referensi dn ketergantungan. Pertama, triangulasi dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Kedua, kecukupan referensial. Kecukupan referensial yaitu, memanfaatkan bahan-bahan yang terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

Kecukupan referensial peneliti dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian baik melalui arsip, catatan lapangan, literatur buku, rekaman atau foto yang digunakan untuk mendukung analisis data. Ketiga, Ketergantungan (*dependability*) dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka penulis selalu berdiskusi dengan dosen pembimbing secara bertahap mengenai konsep yang dihasilkan dilapangan selama proses penelitian berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagi yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah. Sehubungan dengan itu didapat dikatakan bahwa pembangunan yang sedang dalam proses ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat yaitu Partisipasi dalam perencanaan, Partisipasi dalam Pelaksanaan, Partisipasi dalam pengawasan dan penilaian. Salah satu ciri pembangunan desa adalah partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam proses pembangunan tersebut. Dengan demikian partisipasi masyarakat perlu di bina dan terus di tingkatkan agar pembangunan desa mencapai sasaran yang diharapkan, mengenai pentingnya partisipasi aktif segenap lapisan menurut Jjokroamidjojo (2002) sebagai berikut: pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan

berhasil, apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam suatu negara, tidak saja dari pengambil kebijakan tertinggi, perencana, pemimpin pelaksanaan operasional tetapi juga dari petani–petani yang masih tradisional, nelayan, buruh, pedagang kecil dan lain-lain.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan. Dalam pendekatan partisipasi, peran serta masyarakat tidak hanya terbatas dalam pengertian ikutserta fisik, tetapi keterlibatan yang memungkinkan mereka melaksanakan penilaian terhadap masalah dan potensi yang terdapat dalam lingkungan sendiri, kemudian menentukan kegiatan yang mereka butuhkan. Keterlibatan masyarakat ini adalah keterlibatan yang mengarah pada tumbuhnya kemampuan–kemampuan mereka untuk lebih berdaya dalam menghadapi tantangan hidup tanpa harus bergantung dengan orang lain, ketika masyarakat kuat peran orang luar semakin di kurangi, itulah sebabnya pendekatan partisipatif disebut juga dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Tahap paling ideal dari partisipasi masyarakat adalah adalah tahap dimana masyarakat selain dapat memilih dan menentukan dengan kemampuannya sendiri terhadap segala bentuk kegiatan yang sesuai dan menentukan apa yang terbaik bagi kesejahteraan hidupnya, masyarakat juga mampu melakukan kontrol terhadap palaksannya. Pada tahap ideal ini, kegiatan direncanakan, dilaksanakan serta di nilai bersama masyarakat dan untuk mendapatkan partisipasi yang baik di perlukan sebuah pendekatan dan teknik-teknik partisipasi yang sesuai dengan karakter masyarakat. Tujuan dari pendekatan partisipasi adalah adanya perubahan sosial, dimana masyarakat mampu menenyutkan yang terbai bagi dirinya. Masyarakat memberikan segenap kemampuannya baik fisik, pemikiran, dan harta untuk kebutuhan memperkuat dan mengembangkan kapasitasnya (*capacity building*). Dengan demikian pendekatan partisipasi merupakan bagian dari penguatan civil society. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat di

perluan. Pembangunan dapat berjalan terus menerus tetapi hasilnya akan sangat berbeda apabila pembangunan tersebut didukung dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam pembangunan harus dilaksanakan sebagai bagian penting dari pembangunan itu sendiri.

Pengelolaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kedalam 8 tingkatan berdasarkan tingkat kekuasaan . Shirley Arnstein (1969) mengemukakan pengelolaan perang serta masyarakat kedalam 8 tingkatan berdasarkan tingkat kekuasaan yaitu:

1. Kontrol masyarakat (*citizen control*)
2. Pelimpahan kekuasaan (*delegated power*)
3. Kemitraan (*partnership*)
4. Penentruman (*placation*)
5. Konsultasi (*consultation*)
6. Informasi (*information*)
7. Teraphi (*therapy*)
8. Manipulasi (*manipulation*)

Untuk membina dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di perlukan usaha –usaha nyata dengan berbagai jalan, dengan harapan lama-kelamaan partisipasi aktif masyarakat akan tumbuh dengan sendrinya. Upaya dan cara menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dapat dilakukan antara lain di kemukakan oleh Ndraha (2002) sebagai berikut :

1. Memberi stimulasi kepada masyarakat dengan mengrapakan timbulnya response yang di kehendaki, antara lain dalam inpres bantuan pembangunan desa, inpres lomba desa dan sebagainya.
2. Menyesuaikan program pemerintah dengan kebutuhan (keinginan) yang telah lama di raskan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

3. Menumbuhkan dan menanamkan kesadaran akan kebutuhan dan perlunya perubahan di dalam masyarakat dan dalam diri anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga timbul kesediaan berpartisipasi.

Partisipasi demikian tidak datang dengan sendirinya di butuhkan usaha-usaha yang menumbuhkannya dengan kemampuan, ketekunan dan waktu, untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar tersebut, salah satu segi yang perlu mendapat perhatian adalah komunikasi, dimana Tjokroamidjojo (2002) menyatakan bahwa : gagasan-gagasan kebijakan dan rencana hanya akan mendapat dukungan bila di ketahui kemudian di mengerti bahwa hal- hal tersebut mencerminkan sebagian atau seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat (kelompok masyarakat). Kemudian lebih lanjut diterima dengan pengertian oleh masyarakat bahwa hasil daripada kebijaksanaan rencana tersebut akan betul-betul sebagian atau seluruhnya dipetik oleh masyarakat. Komunikasi bukan hanya penerangan menumbuhkan suatu iklim pengertian, aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat an pengembangan kepada tujuan-tujuan yang bersifat pembangunan secara nasional.

Dalam kutipan di atas nampaknya faktor komunikasi berperan untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Dari penjabaran di atas di hubungkan dengan rumusan partisipasi masyarakat, maka kesediaan keterlibatan dan tanggungjawab masyarakat yang dapat menjadi ukuran tingkat partisipasi masyarakat meliputi keseluruhan rangkaian manajemen pengelolaan bantuan pembangunan desa, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penerimaan hasil pembangunan serta penilaian (evaluasi) pengelolaan bantuan pembangunan desa

Dari uraian-uraian diatas dapat di simpulkan berbagai cara untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang di kemukakan para ahli, maka faktor yang sangat penting di inginkan adalah partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yaitu turut serta mengambil bagian dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan tanggungjawab atas hasil-hasil pembangua yang telah di capai. Evaluasi pelaksanaan program partisipasi masyarakat tentang infrastruktur tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan

masuk dan koreksi pelaksanaan pembangunan yang ada pemerintahan desa di Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Dalam hal ini pemerintah desa bulangkulon juga harus merespon koreskai masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan. Implementasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini sesuai dengan prinsip partisipasi (Jokroamidjojo, 2002) adalah kererlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya.

Selain itu juga sesuai dengan *responsiveness* (Jokroamidjojo, 2002) di artikan bahwa lembaga-lembaga Negara atau badan usaha harus berusaha untuk melayani *stakeholders*, responsif terhadap aspirasi masyarakat dan kepentingan *clientele*. Di samping forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban penuh terhadap pembangunan infrastruktur secara baik, sebagaimana konsep transparansi (Jokroamidjojo, 2002) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan politik dari pemerintah, organisasi badan usaha. Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan infrastruktur terutama akses jalan dari desa ke kota. Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua *stakeholders* pembangunan dengan tetap berperan pada prinsip partisipatif, *responsive*, transparan dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan. Namun demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur terkhususnya akses jalan di Desa Bulangkulon kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Menurut, Van Der Kemp dalam Soeradi (2014: 7), mendefinisikan keuangan publik adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Keuangan desa menurut pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaran urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penggunaan Dana Desa anggaran tahun 2019 di Desa Bulangkulon sangat transparan dan berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik untuk menunjang kegiatan masyarakat. Pembangunan yang terjadi selama anggaran tahun tersebut digunakan untuk pembangunan jalan, pendidikan, dan kesehatan kios kampung, dan perawatan bangunan sarana umum.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan pembangunan infrastruktur di wilayah Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab maupun prinsip tanggungjawab, walaupun sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dana desa yang ada di Desa Bulangkulon ini juga sangat transparansi untuk umum.

Penutup

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan masih sangat rendah atau kurang maksimal, terutama dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini dapat ditinjau dengan sebagian masyarakat memberikan jawaban rendah terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan atau indikator-indikator yang penulis ajukan. Masih kurang aktifnya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah disebabkan karena masih kurang pemahannya masyarakat desa akan pentingnya partisipasi mereka dalam mendukung program pembangunan tersebut. Sedangkan aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi yang ditinjau dari, pekerjaan serta penghasilan/pendapatan berhubungan erat dengan partisipasi pada tahap pelaksanaan pembangunan sedangkan

pendidikan berhubungan dengan partisipasi pada tahap perencanaan serta monitoring dan evaluasi.

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemeliharaan. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa pada tahap perencanaan, terdiri dari partisipasi dalam bentuk memberikan saran atau usulan, kritik dan tidak memberikan partisipasi. Sebagian besar masyarakat berpartisipasi dalam bentuk memberikan saran atau usulan. Tingkat Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan terdiri atas sumbangan tenaga, dana, dan material. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulis skripsi ini dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran masyarakat secara umum terhadap program pengambilan keputusan, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa terkhususnya pembangunan jalan, sudah cukup baik meskipun masih sangat terbatas pada masyarakat yang selama ini sudah aktif dalam kegiatan desa. Kebanyakan masyarakat masih bersifat pasif, meskipun sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Juga program-program pemerintahan pusat yang di peruntukan bagi pembangunan dan kemajuan desa.
2. Peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sudah mengalami peningkatan yang cukup baik. Dengan demikian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Bulangkulon sangat berperan cukup baik meskipun peran masyarakat belum secara menyeluruh. Semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bulangkulon tidak terlepas dari kinerja pemerintah desa yang saling bahu membahu dengan BPD, Kepala Dusun, RT/RW serta tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama dalam melakukan kerjasama kepada masyarakat tentang pembangunan yang menjadi program kerja pemerintah Desa Bulangkulon.
3. Meskipun masyarakat senang dengan hasil pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah Desa Bulangkulon namun peran masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan masih sangat minim, tingkat kesadaran masyarakat dalam

melestarikan dan menjaga hasil pembangunan masih perlu di bangun melalui himbauan dan sosialisai. Dengan demikian hasil jerih payah pengurus desa bersama-sama masyarakat dalam mengupayakan pembangunan infrastruktur yang berkesimbngan tidak sia-sia.

4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan evaluasi program pembangunan di Desa Bulangkulon kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik masih kurang. Masyarakat masih bersifat pasif dalam kegiatan pertemuan sebagai sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Bulangkulon, masyarakat lebih mempercayakan kepada BPD dan juga tokoh masyarakat untuk hadir dalam pertemuan guna membahas tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sudah di laksanakan oleh pemerintah desa yang sudah di programkan.
5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Desa Bulangkulon adalah:

- a. Faktor Waktu

Faktor waktu yang dimaksud adalah partisipasi masyarakat untuk meluangkan waktunya dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng kabupaten Gresik.

- b. Faktor Kepuasan Masyarakat

Faktor Kepuasan Masyarakat yang dimaksud adalah berkaitan dengan kepuasan masyarakat, dalam hal ini masyarakat mengaku cukup puas dengan adanya pembangunan infrastruktur di Desa Bulangkulon kecamatan Benjeng kabupaten Gresik

- c. Penggunaan Dana Desa anggaran tahun 2019 di Desa Bulangkulon berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik untuk menunjang kegiatan masyarakat. Pembangunan yang terjadi selama anggaran tahun tersebut digunakan untuk pembangunan jalan, pendidikan, dan kesehatan kios kampung, dan perawatan bangunan sarana umum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk Desa Bulangkulon dan juga Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan di desa yakni, partisipasi masyarakat Desa Bulangkulon dalam tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil kegiatan-kegiatan ini perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan motivasi dan memberikan pengetahuan mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam mensukseskan setiap program pembangunan. Pemerintah sebagai pelaksana kegiatan yang ada di Desa Bulangkulon harus lebih berupaya untuk merangsang dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah, khususnya musyawarah dusun dan rapat diakhir tahun. Dengan adanya saran yang telah di kemukakan, penulis berharap pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Bulangkulon akan berdampak dan menjadikan desa sebagai garda depan dari sistem Pemerintah Republik Indonesia serta menjadi cermin atas sejauh mana penyelenggaraan desa pemerintahan kita. Majunya dan kuatnya Desa akan akan berdampak pada majunya dan kuatnya Negara.

Referensi

- Ali Nurdin. 2000. Identifikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam Pemeliharaan Prasarana Paca Program P3DT, Tasikmalaya.
- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Alfabeta
- Bahreim. 2000. *Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chandra, Eka dkk. 2015. *Membangun Forum Warga “ Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil”*. Yayasan AKATIGA. Bandung
- Cohen And Uphoff 1979 *Feasibility And Application Of Rural Develomen Participate*, Cornell University, Ithaca.
- Hamzens Wildani. 2010. *Perencanaan di Indonesia*. Labdwara: Bogor.
- Hetifa Sj Sumarto. 2003. *Inovasi , Partisipasi dan Good Governace*. Jakarta.

- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Lin Herlina. 2003. Partisipasi sebagai salah satu Determinan dalam Pembangunan Desa. Tesis ITB
- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustikawati. 2016. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara". *E-Journal S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman*, Vol.4, No.2: 2739-2752. Diakses pada . Tanggal 20 Maret 2018
- Panouw Diane. 2003. Analisis Pembangunan Desa Wilayah. Tesis pasca sarjana unstrat manado.
- Slamet, Y. 2015. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press. Surakarta
- Subejo Sugiarto, 2009. *Teknik Sampling*. Gramedia. Bandung
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Pers Sugihen,
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Siagian H. 1989. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung.
- Sari, Yuli Kurnia. 2016. "Partisipasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam Melaksanakan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.8 No.1. 2087-0825. Tanggal 13 Maret 2018.
- Septyasa, Laksana Nuring. 2013. "Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.1 No.1. Diakses pada .Tanggal 20 Maret 2018
- Tanuwijaya, Fransiska. 2016. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pitoe Jambangan Kota Surabaya". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.4 No.2. Diakses pada .Tanggal 17 Maret 2018

Theresia, Aprilia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta

Sumber Lain

Data Monografi Desa Bulangkulon Tahun 2014-2019

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.11 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2006-2025